

PERNYATAAN SIKAP  
MAJELIS RAKYAT KALIMANTAN TIMUR BERDAULAT  
tentang  
*Review Masukan atas Revisi*  
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
IBUKOTA NUSANTARA

Dengan Rahmat Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa

Menyikapi Rencana Pemerintah yang akan merevisi Undang - Undang Nomor 3 tahun 2022 Tentang Ibukota Nusantara yang disampaikan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pada akhir Desember 2022, Kami Pimpinan Majelis Rakyat Kalimantan Timur Berdaulat, berkolaborasi secara berkelanjutan dengan Aliansi Pimpinan Ormas Daerah Kalimantan Timur, merasa perlu memberikan masukan dan menyatakan sikap dalam forum Konsultasi Publik tentang Pokok-Pokok Perubahan pada UU No. 3 tahun 2022 Tentang Ibukota Negara sebagai berikut:

1. Mendukung penuh pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia ke Kabupaten PPU dan Kabupaten Kutai Kertanegara Kalimantan Timur, dan ikut serta berperan aktif mengawal sampai selesai Pembangunan fisik Ibukota Nusantara;
2. Revisi UU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibukota Nusantara tetap sejalan dengan pasal 18 dan 19 UUD 1945 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Penyelenggara Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Nusantara, pada saat ini adalah bersifat peralihan sementara dalam proses pembangunan fisik Ibukota Negara, yang selanjutnya Penyelenggaraan Pemerintahan berupa Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Negara Nusantara disingkat dengan Provinsi DKI Nusantara


4. Selanjutnya Provinsi Daerah Khusus Nusantara dipimpin oleh Gubernur dan Wakil Gubernur serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipilih secara demokratis melalui Pemiluakada dan mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku
5. Penyusunan dan penetapan daerah pemilihan anggota DPRD di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara dilakukan oleh komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
6. Pendanaan persiapan serta pembangunan dalam pemindahan Ibukota Negara Baru sepenuhnya dibebankan pada APBN


Demikian Pernyataan Sikap ini kami buat, disampaikan kepada yang terhormat **Presiden Republik Indonesia, Ketua DPR RI, Gubernur Provinsi Kaltim dan Ketua DPRD Kaltim** untuk mendaoat perhatian sebagaimana mestinya

Di tetapkan di : Balikpapan  
Pada tanggal : 02 Agustus 2023

MAJELIS RAKYAT KALIMANTAN TIMUR BERDAULAT



  
H. MOHAMMAD DJAILANI, SE, MBA  
Ketua Umum

  
DRS. H. ZULKIFLI SYAHAB, M.M  
Sekretaris Jendral